

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, perekonomian dunia menerapkan sistem perekonomian pasar bebas yang menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Perekonomian Indonesia tumbuh dengan laju yang semakin pesat, sehingga berdampak besar pada kemampuan perusahaan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Persaingan bisnis global semakin ketat dan proses peningkatan industri memakan waktu lebih lama (Dhiva & Gunawan, 2023). Meningkatkan kinerja perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan dalam bertahan di tengah persaingan global serta menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Memenuhi keinginan para pemangku kepentingan serta mencari keuntungan merupakan tujuan didirikannya perusahaan agar kegiatannya menjadi lebih baik.

Wujud empati perusahaan merupakan tanggungjawab lingkungan dan sosial mengenai keterbukaan informasi agar mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan yang melibatkan masyarakat (Norman Thomas, 2020). Akan tetapi, aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan seringkali mengabaikan dampak dan masalah sosial maupun lingkungan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti meningkatnya polusi udara, perubahan iklim dan penggundulan hutan. Salah satunya terjadi dalam industri pertambangan.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), salah satu perusahaan yang memiliki kasus pertambangan di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk yang merupakan Perusahaan Tambang Batubara dengan Perjanjian Kontrak Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan luas lahan yang di Kuasai 31.380 Hektar, berada di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan kekuasaan Perusahaan ini berada di 3 Kabupaten yaitu HSU, Balangan Hingga Tabalong. Aktifitas Pengerukan dan Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan berkontribusi besar terhadap Kejadian Bencana Banjir yang terjadi pada 2021 di Kalimantan Selatan menyebabkan 24 orang meninggal dunia dan 113.000 orang mengungsi (WALHI, 2021).

Peran masyarakat dan lingkungan diperlukan untuk melakukan kontrol sosial suatu perusahaan guna mendorong pengungkapan tanggungjawab sosial. Dalam mendukung hal ini, diperlukan sebuah kerangka konsep global yang dapat diukur serta menggunakan bahasa yang konsisten dengan tujuan agar mudah dipahami dan lebih jelas. Konsep *triple bottom line* yang dimuat dalam sebuah laporan perlu disajikan perusahaan agar dalam melakukan investasi para investor tidak merasa bersalah dan masyarakat merasa tenang (Gunawan & Sjarief, 2022). Laporan tersebut biasa disebut dengan *sustainability report* atau laporan keberlanjutan.

Menurut *Global Reporting Initiative*, *sustainability report* adalah laporan yang diterbitkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam mengungkapkan lingkungan, sosial serta dampak ekonomi agar perusahaan dapat memahami, mengukur, dan mengomunikasikan kinerja perusahaan terkait *environmental performance*, *social performance*, dan *economic performance*. Tujuan *sustainability*

report agar masyarakat dan pemegang saham mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Teori *stakeholder* melandasi pengungkapan *sustainably report*. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada pemangku kepentingannya karena mereka sama sekali atau sebagian dipengaruhi oleh proses dan aktifitas perusahaan. Teori ini menjadi dasar dari gagasan bahwa pengungkapan laporan ketaatan merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan manfaat yang telah diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat (Rahmat, 2022).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainably report*, salah satunya yaitu aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan mengelola sumber dananya. Semakin tinggi rasio aktivitas ini, semakin berhasil perusahaan mengelola aktivitya (Apriliyani et al., 2022). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas perusahaan berpengaruh positif pada pengungkapan *sustainably report*. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Mahendra & Purwanto, 2024) yang mengungkapkan bahwa aktivitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainably report*.

Selain aktivitas perusahaan, dewan komisaris independen juga dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainably report*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 ayat 5 (lima) komisaris adalah organ perusahaan efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Meningkatkan monitor terhadap pihak perusahaan agar bekerja lebih baik dengan meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya untuk memperbaiki kualitas informasi akuntansi yang disajikan merupakan fungsi keberadaan komisaris independen. Menurut (Lasdi, 2025) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial (Nizzam Zein Susadi & Kholmi, 2021). Berdasarkan hasil penelitian (Prastyawan & Astuti, 2023) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Selain ketiga faktor diatas, kepemilikan institusional juga memengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Banyak lembaga eksternal yang memiliki saham di perusahaan dikenal sebagai kepemilikan institusional. Besarnya kepemilikan institusional dapat mempengaruhi bagaimana manajemen mengendalikan investor saat mereka mengungkapkan *sustainability report*. Hal ini penting karena menunjukkan transparansi informasi perusahaan dan mencakup langkah-langkah yang telah diambil perusahaan untuk menjaga ekonomi, lingkungan, dan sosialnya (Roviqoh & Khafid, 2021). Menurut (Prastyawan & Astuti, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Akan tetapi, menurut

(Kusumawardani, 2022) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Sebuah perusahaan, khususnya perusahaan pertambangan, perlu memperhatikan lingkungan. Hal ini dikarenakan bisnis dapat berfungsi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Berbagai contoh ketidakpuasan masyarakat muncul dalam beberapa tahun terakhir, dimulai dengan pencemaran lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran yang merusak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengklaim limbah industri pertambangan mempunyai pengaruh besar terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa contoh dampak tersebut antara lain terancam punahnya ekosistem, terkontaminasinya bahan baku air minum bahkan rusaknya struktur tanah yang dapat mengakibatkan banjir (BHR News, 2021). Dengan adanya *sustainability report* pada perusahaan pertambangan diharapkan semua perusahaan harus lebih peduli dan memperhatikan pengungkapan *sustainability report* serta adanya kesinambungan terhadap lingkungan sosial sekitar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan masih ada perbedaan hasil riset dari beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti ini kembali. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penggunaan obyek ini adalah pertambangan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, peneliti memodifikasi model dari peneliti-peneliti sebelumnya yang mendorong untuk dilakukan penelitian selanjutnya dengan judul "Pengaruh Aktivitas Perusahaan, Dewan Komisaris Independen dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI

Tahun 2021-2023". Sampel tahun yang diambil setelah ditetapkannya Peraturan OJK No. 51/POJK. 03/2017 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul saat ini adalah:

- 1) Dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan sektor pertambangan yang menyebabkan konflik kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat.
- 2) Semua perusahaan belum menerapkan program pengungkapan *sustainability report*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Sumber penelitian ini bersumber dari BEI pada perusahaan sektor pertambangan.
- 2) Data penelitian yang digunakan dari tahun 2021-2023.
- 3) Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh aktivitas perusahaan, dewan komisaris independen dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah aktivitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
- 2) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
- 3) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
- 4) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh aktivitas perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengaplikasian ilmu serta menyelaraskan teori yang diperoleh terhadap praktik yang sebenarnya serta dapat memberikan masukan wawasan, pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh aktivitas perusahaan, dewan komisaris independen dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman investor tentang tanggungjawab sosial dan pengetahuan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta menciptakan nilai bagi perusahaan mengenai pengungkapan *sustainability report*.
- 2) Menjadi salah satu wujud media transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada *stakeholder* terkait masalah sosial maupun lingkungan.

3) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor untuk menilai dan menjalankan perusahaan melalui informasi pada pengungkapan *sustainability report* yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, dewan komisaris independen dan struktur kepemilikan. Dengan adanya penelitian ini, mempermudah investor untuk mengambil keputusan investasi untuk masa yang akan datang.

